



**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021**

**Disusun :
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahNYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yakni Tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Dalam penyusunan LAKIP ini tentunya tidak lepas pada rencana pembangunan yang telah dibuat dalam jangka menengah daerah kedepan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami tidak menutup kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap kesempurnaan penyusunan LAKIP ini dan tim penyusun LAKIP Dinas Sosial sehingga laporan ini dapat selesai. Smoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terumata karyawan dan kaeyawati Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo khususnya serta instansi pemerintah lainnya maupun masyarakat pada umumnya.

Sidoarjo, Februari 2022

KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Drs. Ec. ASROFI, MM., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196205241990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I : PENDAHULUAN	12
1.1 Latar belakang	12
a) Dasar Hukum	12
b) Tujuan Penyusunan	12
1.2 Gambaran Umum OPD	12
a) Struktur Organisasi	14
b) Tugas Pokok dan Fungsi	15
1.3 Aspek Strategis OPD	22
a) Sumber Daya Aparatur	22
b) Aset Yang Dimiliki	23
c) Isu Strategis Yang Dihadapi	24
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Perencanaan Strategis	25
2.2 Rencana Kerja Tahunan	27
2.3 Perjanjian Kinerja	32
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	39
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	39
a) Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	39
b) Analisa Pencapaian Kinerja Jangka Menengah	39
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	39
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	40
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah ..	40
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan standar nasional	40
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	41
c) Pengukuran Kinerja Tahunan	41
d) Analisa Pencapaian Kinerja Tahunan	41
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	42
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	42
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah ..	42
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan standar nasional	42
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	43
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	43
a) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	43
b) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang	44
3.4 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	45

3.5 Laporan Realisasi Anggaran	51
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	52
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
a) Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
b) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM	53
LAMPIRAN : PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH	
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW OLEH INSPEKTORAT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	22
Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	23
Tabel 3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Menurunnya angka PMKS	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	100%	Berhasil

Sasaran tersebut di atas didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan dengan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Indikator Sasaran / Indikator Program / Indikator Kegiatan	% Capain	Kategori
	Sasaran : Menurunnya Angka Penyangdang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase penurunan PMKS	100%	Berhasil
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	Berhasil
a.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan Perencanaan yang dilaksanakan	100%	Berhasil
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
		Jumlah data dan informasi yang disusun	100%	Berhasil
b.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	100%	Berhasil
c.	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	100%	Berhasil
d.	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah BBM yang disediakan	50%	Kurang

		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	100%	Berhasil
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	100%	Berhasil
		Jumlah buku bacaan dan Koran yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	101,26 %	Sangat Berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	32%	Kurang
		Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar	100%	Berhasil
e.	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
g.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	Berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	100%	Berhasil
h.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	100%	Berhasil
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	Berhasil

		Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	100%	Berhasil
i.	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	100%	Berhasil
2.	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya	Prosentase fakir miskin yang telah terpenuhi fungsi sosialnya	93,1%	Berhasil
		Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Berhasil
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	81,48%	Cukup
		Jumlah keluarga miskin yang dimonev dalam menerapkan hasil pelatihan	81,48%	Cukup
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS	Jumlah peserta rakor/sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan	100%	Berhasil
		Jumlah PSKS yang dibina	100%	Berhasil
	Pembinaan yayasan panti asuhan	Jumlah Panti Asuhan yang diberi pembinaan	-	-
	Pengadaan Rastra APBD	Jumlah fakir miskin penerima Rastra APBD	100%	Berhasil
	Fasilitasi dan Monev bantuan pangan APBN	Jumlah penerima bantuan pangan APBN yang dimonev	100%	Berhasil
3.	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase tuna sosial yang terlayani	100%	Berhasil
		Persentase penyandang disabilitas yang terlayani	100%	Berhasil

		Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	100%	Berhasil
		Persentase PMKS yang terlayani	100%	Berhasil
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tuna sosial	Jumlah PMKS (18 jenis) yang dibina	120%	Sangat Berhasil
		Jumlah PMKS (18 jenis) yang dimonev	120%	Sangat Berhasil
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	100%	Berhasil
		Jumlah penyandang disabilitas yang dimonev	100%	Berhasil
	Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak dan lansia	Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina	100%	Berhasil
		Jumlah lansia penyandang masalah kesejahteraan yang dibina	100%	Berhasil
		Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dimonev	100%	Berhasil
		Jumlah lansia penyandang masalah kesejahteraan yang dimonev	100%	Berhasil
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	Berhasil
4.	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100%	Berhasil
		Prosentase korban bencana sosial yang tertangani	100%	Berhasil
		Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	Berhasil

	Perlindungan sosial korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana korban bencana alam yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah personil TAGANA yang dibina	100%	Berhasil
	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Jumlah sarana dan prasarana korban bencana sosial yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah fasilitas korban bencana yang tersedia	100%	Berhasil
	Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah pendamping PKH yang dibina	100%	Berhasil
		Jumlah peserta rakor/ sosialisasi program perlindungan jaminan sosial	100%	Berhasil
		Jumlah peserta bintek verifikasi dan validasi	100%	Berhasil

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu :

1. Pada tahun 2021 adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian, dimana banyak pekerja yang di PHK oleh perusahaan. Selain itu adanya pembatasan jam operasional juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.
2. Adanya beberapa jenis PMKS yang sulit untuk diturunkan antara lain : disabilitas, gelandangan, gelandangan psikotik dan psikotik;
3. Pendataan PMKS yang kurang akurat.

Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan, antara lain :

1. Melalui *launching* program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako untuk warga miskin dan Bantuan .
2. Melakukan pembinaan kepada gelandangan, gelandangan psikotik dan psikotik;
3. Memberikan pelatihan dasar bagi PMKS.
4. Pendataan PMKS secara berkala.

Rencana Tindak lanjut Dinas Sosial adalah :

1. Meningkatkan SDM tim verifikasi dan validasi agar pendataan DTKS valid.

2. Pembuatan aplikasi SIKS-SDA untuk meminimalisir kesalahan data.
3. Memberikan pembinaan/pelatihan ketrampilan dasar untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga.
4. Sosialisasi dan bimtek KUBE untuk membantu perekonomian PMKS.
5. Memberikan motivasi kepada keluarga agar mau dan mampu untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan mau menerima kembali sebagai anggota keluarga besarnya;

Pada tahun yang akan datang Dinas Sosial akan berupaya untuk dapat mengoptimalkan anggaran melaksanakan program maupun kegiatan dengan mengacu pada prioritas dalam menangani PMKS dengan memaksimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga target sasaran akan tercapai secara optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

b) Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 adalah :

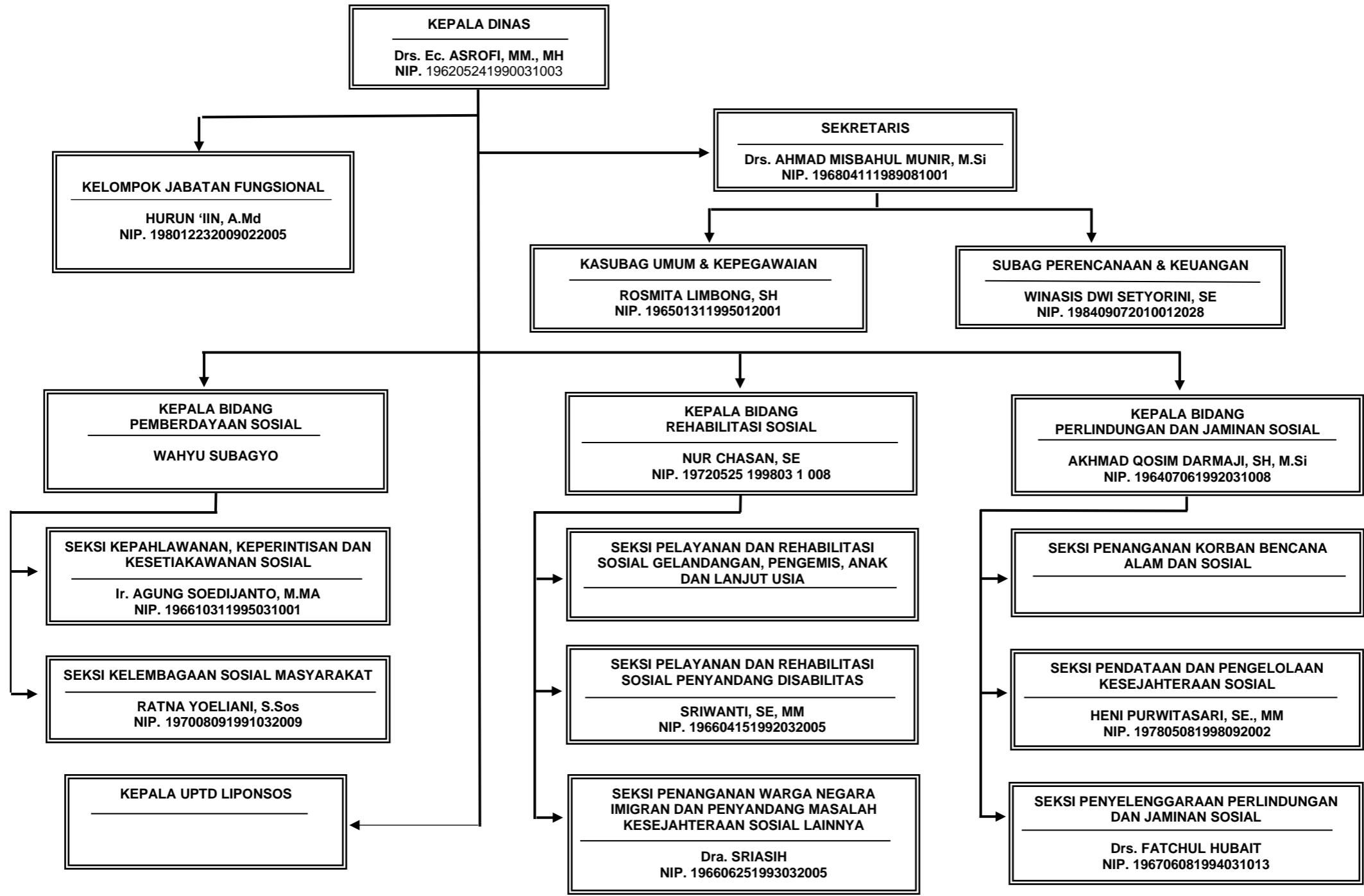
1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dicapai; dan
3. Sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum OPD

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Unsur Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - b) Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 - c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
 - b) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c)
- 4) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Pelayanan Rehabilitasi Sosial .



a) Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas dan Akuntabilitas pada Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan Gedung kantor Dinas;
- c. Melaksanakan pengadaa, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Menerima dan Mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/website Dinas;
- f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. Melaksanakan Analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

❖ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Dinas;
- b. Mengkoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Dinas;
- c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas;
- e. Menyusun laporan kinerja Dinas;
- f. Melaksanakan Analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
- i. Melaksanakan Analisa dan evaluasi anggaran;
- j. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pemberdayaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis pemberdayaan sosial;
- d. Pelaporan kinerja Bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat**

Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat, meliputi :
 1. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 3. Pelaksanaan pemantauan, perizinan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/ pengelolaan sumber dana sosial;
 4. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 5. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan.
- c. Menyusun dan memperbarui data kelembagaan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial**

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial meliputi :
 1. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 2. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
 3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
 4. Koordinasi kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/ mahasiswa, guru/masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dan restorasi sosial.
- c. Menyusun dan memperbarui data kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- d. Pelaporan kinerja Bidang
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Anak dan Lanjut Usia

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anak dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan pelaksanaan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, Anak dan Lanjut Usia, meliputi;
 1. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
 2. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak, , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak.
- c. Menyusun dan memperbaharui data pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas***

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan orang dengan gangguan jiwa, bekas penyakit kronis;
- c. Menyusun dan memperbaharui data pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya***

Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis penanganan warga migran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan warga migran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya meliputi

- gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks Tuna Susila;
- c. Menyusun dan memperbaharui data penanganan warga negara migran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) lainnya;
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis penanganan warga negara migran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) lainnya;
 - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaporan kinerja bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, meliputi;
 - 1. Kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana korban bencana alam dan sosial;
 - 2. Kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial warga negara bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - 3. Identifikasi, assesmen serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan sosial dan intervensi psikososial.
- c. Menyusun dan memperbaharui data penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi;
 - 1. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan;

2. Bimbingan teknis penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan.
- c. Menyusun dan memperbaharui data penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Pendataan dan Pengelola Kesejahteraan Sosial**

Seksi Pendataan dan Pengelola Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pendataan dan pengelola kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan pengelola kesejahteraan sosial;
- c. Menyusun dan memperbaharui data pendataan dan pengelola kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendataan dan pengelola kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Liponsos

Unit Pelaksana Teknis Liponsos adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang bersifat teknis

operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jengjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.3 Aspek Strategis OPD

A. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai di Dinas Sosial sebanyak 65 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1

Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	33
2	Tenaga Kontrak	32
	Total	65

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2021

Eselonisasi Jabatan

Eselonisasi jabatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas : Eselon II b.
- b. Sekretaris Dinas : Eselon III a.
- c. Kepala Bidang : Eselon III a.
- d. Kepala Seksi : Eselon IV a.
- e. Kepala Sub. Bagian : Eselon IV a.

Data Berdasarkan Jabatan Struktural

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 8 (delapan) Subbag/Seksi, 19 (sembilan belas) staff sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris.	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub. Bagian	2
5	Kepala Seksi	8
6	Staff	18
7	Pegawai Fungsional	1
8	Kepala UPT Liponsos	-
	Total	33

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2021

Seluruh pegawai Dinas Sosial berjumlah 33 orang terdiri dari jumlah pegawai laki-laki sebesar 15 dan jumlah pegawai perempuan sebesar 18 orang.

Data Berdasarkan Pendidikan Penjurangan.

Tabel 3. Berdasarkan Pendidikan Penjurangan

No	Eselon	Jumlah
1	DIKLATPIM II	1
2	DIKLATPIM III	3
3	DIKLATPIM IV	8
	Jumlah	12

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2021

Tabel 2 menunjukkan pendidikan penjenjangan sejumlah 12 orang, dengan DIKLATPIM II berjumlah 1 orang, DIKLATPIM III sejumlah 3 orang, DIKLATPIM IV sejumlah 8 orang.

B. Aset Yang Dimiliki

Untuk mendukung kegiatan sehari-hari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mempunyai :

1. Gedung di Jalan Raya Pahlawan Nomor 45 dengan luas tanah 1.300 M² dengan luas bangunan lantai 1.251 M².
2. Gedung di Ds Kebonagung Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan luas tanah 1757.64 M².
3. Gedung di Ds. Lebo Kec. Sidoarjo dengan luas tanah 1590 M² dengan luas bangunan lantai 414 M².
4. Gedung UPTD Liponsos di Jl Kutuk Sidokare No. 311 Sidoarjo dengan luas tanah 8000 M² dengan luas bangunan lantai 5380 M².
5. Tanah untuk makam pahlawan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo dengan luas tanah 22.345 M² .
6. Sedangkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tersedia sarana dan Prasarana sebagai berikut
 - a. Kendaraan roda 4 : 14 buah
 - b. Kendaraan roda 2 : 7 buah
 - c. Perahu : 2 buah

c. Isu Strategis yang Dihadapi

Tantangan-tantangan Dinas Sosial yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial masih dihadapkan dengan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial. Permasalahan-permasalahan dalam penanganan PMKS (gelandangan, pengamen, pengemis, anak jalanan, WTS, gelandangan psikotik) masih sangat kompleks serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap PMKS sehingga perlu adanya perlakuan khusus dalam

menanganinya. Fasilitasi pada pelayanan PMKS tidak gampang, karena perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda. Selain itu, implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, pekerja imigran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/AIDS, permasalahan sosial lintas provinsi/daerah. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial, selain itu ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta flukturisasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial.

2. Masih tingginya angka kemiskinan yang menimbulkan dampak lanjutan seperti masalah ketunaan sosial. Terbatasnya sumber daya di wilayah pedesaan dan tuntutan untuk menjaga kelangsungan hidup mendorong arus urbanisasi, ke wilayah perkotaan maupun antar daerah. Tingginya kompetisi kehidupan di wilayah perkotaan justru semakin memarginalkan posisi warga miskin menjadi warga kota yang tidak mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada akhirnya mereka menjadi bagian dari komunitas jalanan dan hidup tergantung dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain.
3. Adanya pandemic covid-19 ditahun 2021 dimana banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak pekerja yang di PHK menimbulkan polemik baru dimana adanya kenaikan PMKS yang signifikan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra
Dinas Sosial

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan kopersai serta pemberdayaan masyarakat	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing	S.4 Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

b. Matriks Rencana Strategis

Sasaran		Formula Indikator	Kondisi Awal	Target						Program/Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	jumlah PMKS dibagi jumlah penduduk x 100%	1.93%	1.93%	1.9%	1.87%	2,23%	2,38%	1.81%	A	Program Pemberdayaan Sosial
			1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
			1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
			1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
			1.4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
			B	Program Rehabilitasi Sosial							
			2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
			2.1	Penyediaan Permakanan							
			2.2	Penyediaan Sandang							
			2.3	Penyediaan Alat Bantu							
			2.4	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial							
			2.5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
			2.6	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan							
			3	Rehabilitasi Sosila Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial							
			3.1	Penyediaan Permakanan							
			3.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mentar, Spriritual dan Sosial							
			C	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial							

									4	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
									4.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
									4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
									4.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
									4.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
									D	Program Penanganan Bencana
									5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
									5.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
									E	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
									6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
									6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
									F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
									7	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									7.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									7.2	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
									7.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									7.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
									8.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
									8.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									8.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
									9	Administrasi Umum Perangkat Daerah

										9.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										9.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
										9.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										9.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										9.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
										9.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
										9.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
										10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
										10.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
										11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
										11.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
										11.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
										11.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
										12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
										12.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
										12.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
										12.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
										12.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

			2.2 Rencana Kerja Kerja Tahun 2021									
Sasaran			Target Perubahan 2021	Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran		
Uraian	Indikator	Uraian		Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target				
1	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	2,38 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan sekretariat	85%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 2 tahap b. 1 rekomendasi	Rp.79.105.374,-		
									a. Penyusunan dokumen perencanaan PD	c. Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu	c. 4 Dokumen	Rp. 76.221.164,-
									b. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	a. 1 Dokumen	Rp. 339.390,-
									c. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	Rp. 339.390,-
									d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp. 887.260,-
									e. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	Rp. 1.318.170,-
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi anggaran PD	85%	Rp. 5.472.805.365,-
									a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	396 orang	Rp. 5.470.586.000,-

								b. Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	Rp. 965.001,-
								c. Koordinasi dan penyusunan lapran keuangan bulanan/tribulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran PD yang tersusun	12 laporan	Rp. 1.254.364,-
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nlai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	Rp. 595.42.969,-
								a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	27 buah	Rp. 2.203.833,-
								b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	392 buah	Rp. 27.438.355,-
								c. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM yang disediakan	22.380 liter	Rp. 223.800.000,-
								d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	450 buah	Rp. 2.305.463,-
								e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan korang yang tersedia	2 buah	Rp. 3.720.000,-
								f. Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	329 kotak	Rp. 7.632.500,-

								g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 328.452.818,-
								Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	29 unit	Rp. 418.923.834,-
								a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	29 unit	Rp. 418.923.834,-
								Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	Rp. 1.115.110.800,-
								a. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	4500 surat	Rp. 240.000,-
								b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	Rp. 283.000.000,-
								c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar d. Jumlah tenaga keamanan yang terbayar e. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	a. 48 orang b. 48 orang c. 228 orang d. 336 orang	Rp. 831.870.000,-

								Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	160 unit	Rp. 222.639.584,-
								a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	a. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara b. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a. 19 unit c. 160 unit	Rp. 127.500.000,-
								b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luas Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	Rp. 30.139.584,-
								c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 jenis	Rp. 3.000.000,-
								d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	139 unit	Rp. 62.000.000,-
					Program pemberdayaan sosial	Prosentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam	100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	6 PSKS	Rp. 2.541.137.685,-

					penyelenggaraan kesejahteraan sosial		a. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah PSM yang dibina	125 PSM	Rp. 192.854.600,-	
							b. Peningkatan Kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKS yang dibina	18 TKS	Rp. 432.000.000,-	
							c. Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina	5 PSKS	Rp. 1.910.710.806,-	
							d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	1 LK3	Rp. 5.573.279,-	
					Program Rehabilitasi Sosial	a. 5,89 % b. 1,94 % c. 5,38 %	a. Persentase tuna sosial yang terlayani b. Persentase penyandang Disabilitas yang terlayani	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	a. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis yang mendapatkan permakanaan b. Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	a. 2319 orang b. 125 orang	Rp. 352.883.200,-

						<p>c. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani</p> <p>d. Persentase PMKS yang terlayani</p>	d. 100%		<p>anak terlantar, lansia terlantar yang mendapatkan bantuan sandang</p> <p>c. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan alat bantu</p> <p>d. Jumlag gepeng terlantar yang mendapatkan bimbingan</p> <p>e. Jumlah keluarga anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bimbingan</p>	<p>c. 16 orang</p> <p>d. 900 orang</p> <p>e. 137 orang</p>	
								a. Penyediaan Permakanan	<p>a. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di lar panti yang mendapat bantuan permakanan</p> <p>b. Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan</p> <p>c. Jumlah gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan</p>	<p>a. 87 orang</p> <p>b. 1332 orang</p> <p>c. 900 orang</p>	Rp. 8.331.340.095,-
								b. Penyediaan Sandang	<p>a. Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan sandang;</p> <p>b. Jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan sandang;</p>	<p>a. 50 anak</p> <p>b. 75 orang</p>	Rp. 32.810.475,-

									c. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	16 orang	Rp. 69.000.000,-
									d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah gepeng terlantar yang mendapat bimbingan	900 orang	Rp. 342.809.296,-
									e. Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	a. Jumlah keluarga anak terlantar yang mendapat bimbingan b. Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar yang mendapat bimbingan	a. 50 orang b. 87 orang	
									f. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	a. Tersedianya layanan data dan pengaduan PMKS b. Terlaksananya Rakor penanganan PMKS c. Terlaksananya Operasi Simpati/Penjangkauan PMKS	a. 12 bulan b. 100 orang c. 3 bulan	
									g. Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar	12 bulan	
									Rehabilitasi Sosial Penyandang	a. Jumlah PMKS lainnya di luar panti	a. 20 orang	Rp. 60.037.120,-

							Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	yang mendapat permakanan b. Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	b. 100 orang	
							a. Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	20 orang	Rp. 14.937.120,-
							b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100 orang	
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;	90%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Presentase fakir miskin yang diusulkan pada DTKS b. Prosentase Rekom JKMM yang dikeluarkan c. Persentase fakir miskin yang dilatih	a. 33 % b. 100% c. -	Rp. 13.983.692.800,-
							a. Pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/kota	a. Jumlah fakir miskin yang terdata b. Jumlah Rumah KPM PKH yang terlabeli c. Jumlah SDM yang diberikan penguatan d. Jumlah desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi data/Desk SIKS NG	a. 646.910 jiwa b. 25.000 rumah c. 200 orang d. 353 desa e. 63 Puskesmas	Rp. 2.353.067.892,-

									e. Jumlah Puskesmas yang terfasilitasi	f. 390 orang	
								b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah rekom JKMM yang dikeluarkan	100%	Rp. 44.537.600,-
							c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	a. Jumlah sosialisasi APBN yang dilaksanakan	a. 1 kali		Rp. 11.072.355.308
								b. Jumlah rapat koordinasi PKH yang dilaksanakan	b. 3 kali		
								c. Jumlah rekonsiliasi bansos PKH yang dilaksanakan	c. 4 kali		
								d. Jumlah Fakir miskin penerima program sembako	d. 6000 KPM		
								e. Jumlah penerima bantuan sosial Covid-19	e. 100.000 KPM		
							d. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	a. Jumlah keluarga miskin yang dilatih	a. –		Rp. 363.732.000,-
								b. Jumlah keluarga miskin yang dimonev	b. –		
								c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KUBE	c. 360 orang		
								d. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek KUBE	d. 288 orang		

					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani	100 %	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Tagana yang dibina tepat waktu	50 orang	Rp. 329.082.678,-
								a. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga bencana	a. Jumlah rakor/sosialisasi yang dilaksanakan b. Jumlah anggota Tagana yang dibina	a. 2 kali b. 600 orang	Rp. 329.082.678,-
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	1 TMP	Rp. 104.997.233,-
								a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	1 TMP	Rp. 104.997.233,-

2.3. Perjanjian Kinerja

1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Awal Tahun 2021	Target Perubahan Tahun 2021
1.	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Persentase Penurunan PMKS terhadap penduduk 2. Persentase bantuan sosial yang tersalurkan tepat sasaran	1,81%	2,38% 100%

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No.	PROGRAM	Indikator Program	Target Tahun 2021	Penganggung Jawab
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	Sekretaris
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Program Rehabilitasi Sosial	a. Persentase tuna sosial yang terlayani b. Persentase penyandang Disabilitas yang terlayani c. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani d. Persentase PMKS yang terlayani	a. 5,89% b. 1,94% c. 5,38% d. 100%	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;	100%	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani	100%	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Program Pengelolaan Taman Makam	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

3) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV

No.	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2021	Penganggung Jawab
1	Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan PD	a. Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun b. Jumlah dokumen penganggaran yang disusun a. Jumlah dokumen monev PD yang disusun b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Disusun Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti a. 4 Dokumen b. 1 Dokumen 1 Laporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	a. Penyediaan barang/jasa perkantoran	a. Jumlah BBM yang disediakan b. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar c. Jumlah STNK kendaraan dinas	a. 16.730 liter b. 22 orang/bulan c. 15 unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		<p>yang lunas pajaknya</p> <p>d. Jumlah buku bacaan dan Koran yang tersedia</p> <p>e. Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia</p> <p>f. Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia</p> <p>g. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia</p> <p>h. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola</p> <p>i. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan</p> <p>j. Rekening listrik, air, telepon, dan interner yang terbayar</p>	<p>d. 2 buah</p> <p>e. 15 macam</p> <p>f. 50 jenis</p> <p>g. 7 orang</p> <p>h. 5000 surat</p> <p>i. 300 kotak</p> <p>j. 1 tahun</p>	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	
c.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang diadakan	12 unit	
d.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	<p>a. Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara</p> <p>b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</p> <p>c. Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara</p>	<p>a. 2 unit</p> <p>b. 20 unit</p> <p>c. 30 unit</p>	
e.	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	a. Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	a. 45 stel	

		b. Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	b. 94 stel	
3.	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS lainnya	a. Jumlah peserta rakor dari sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan; b. Jumlah PSKS yang dibina	a. - b. 10 PSKS	Kepala Seksi Kelembagaan Sosial, Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
4.	Pembinaan Yayasan Panti Asuhan	Jumlah Panti Asuhan yang diberi pembinaan	-	
5.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	a. Jumlah keluarga miskin yang dilatih b. Jumlah keluarga miskin yang dimonev dalam menerapkan hasil pelatihan	a. 270 orang b. 270 orang	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran bantuan, Stimulan dan Penataan Lingkungan
6.	Pengadaan Rastra APBD tepat sasaran	Jumlah fakir miskin penerima Rastra APBD	140.572 RTS	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
7.	Fasilitasi dan Monev bantuan pangan APBN	Jumlah penerima bantuan pangan APBN yang di monev	95.372 RTSPM	
8.	Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak dan lansia	a. Jumlah anak PMKS yang dibina b. Jumlah lansia PMKS yang dibina c. Jumlah anak PMKS yang di monev d. Jumlah lansia PMKS yang dimonev	a. 100 anak b. 100 lansia c. - anak d. 100 lansia	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
9.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	a. Jumlah disabilitas yang dibina b. Jumlah Disabilitas yang di monev	a. 20 orang b. 20 orang	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosila Penyandang Cacat

10.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tuna sosial	a. Jumlah PMKS (18 jenis) yang dibina b. Jumlah PMKS (18 jenis) yang dimonev	a. 100 orang b. 100 orang	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
11.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	a. Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial b. Persentase sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang layak fungsi	a. 900 orang/tahun b. -	Kepala UPT PP Rehsos
12.	Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	a. Jumlah pendamping PKH yang dibina b. Jumlah peserta bimtek verifikasi dan validasi c. Jumlah rakor/sosialisasi program dan perlindungan jaminan sosial	a. 127 orang b. 150 orang c. 1 kali	Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	a. Jumlah sarana prasarana korban bencana alam b. Jumlah personil Tagana yang dibina	a. 7 unit b. 50 orang	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara a. Jumlah sarpras yang dipelihara	1 TMP 1 TMP	

4) Anggaran Per Program / Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Penyusunan dokumen perencanaan PD	Rp. 76.221.164,-
	b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 339.390,-
	c. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 339.390,-
	d. Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 887.260,-
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 1.318.170,-
	f. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.470.586.000,-
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan akhir Keuangan	Rp. 965.001,-
2.	h. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD	Rp. 1.254.364,-
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Rp. 2.103.883,-
	j. Penyediaan peralatan dan perengkapan kantor	Rp. 27.438.355,-
	k. Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 223.800.000,-
	l. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 2.305.463,-
	m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 3.720.000,-
	n. Fasilitasi kunjungan tamu	Rp. 7.632.500,-
	o. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 328.452.818,-
	p. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 418.923.834,-
	q. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 240.000,-
	r. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 283.000.000,-
	s. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 831.870.800,-
	t. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lainnya	Rp. 127.500.000,-
	u. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 30.139.584,-
	v. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 3.000.000,-
	w. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 62.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan Sosial	
	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Rp. 192.853.600,-
	b. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	b. Rp. 432.000.000,-
	c. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	c. Rp. 1.910.710.806,-
	d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	d. Rp. 5.573.279,-

4.	Program Rehabilitasi Sosial	
	a. Penyediaan Perumahan	a. Rp. 8.337.485.718,-
	b. Penyediaan sandang	b. Rp. 32.810.475,-
	c. Penyediaan Alat Bantu	c. Rp. 69.000.000,-
	d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	d. Rp. 342.809.296,-
	e. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	e. Rp. 13.350.000,-
	f. Pemberian Layanan data dan Pengaduan	f. Rp. 68.613.518,-
	g. Pemberian Layanan Kedaruratan	g. Rp. 760.846.546,-
	h. Penyediaan Perumahan	h. Rp. 14.937.120,-
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	i. Rp. 45.100.000,-
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Pendataan fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Rp. 2.503.067.892,-
	b. Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	b. Rp. 44.537.600,-
	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	c. Rp. 11.072.355.308,-
	d. Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	d. Rp. 363.732.000,-
6.	Program Penanganan Bencana	
	a. Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencan	Rp. 329.082.678,-
7.	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 104.997.233,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1.	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	5,71%	5,93%	100%

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran kinerja jangka menengah/tujuan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja tujuan di tahun 2021.

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi di Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	2,38%	2,38%	100%

b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi di Tahun 2021	Target Perubahan Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	2,38%	2,38%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1.93%	1.89%	1.83%	2,23%	2,38%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, dengan kenaikan sebesar 0,15% dikarenakan dampak pandemi covid-19, akan tetapi di tahun sebelumnya capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi di Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	2,38%	2,38%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja mencapai 123,2% dari target jangka menengah.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

Untuk perbandingan capaian kinerja dari standar nasional disampaikan bahwa pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan RENSTRA dan RPJMD adalah prosentase PMKS terhadap penduduk dalam arti mengukur prosentase penurunan PMKS, sedangkan standar nasional tercermin dalam permendagri Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memfokuskan pada penanganan pemenuhan jenis pelayanan dasar. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan standar capaian kinerja nasional tidak dapat diperbandingkan.

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi di Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja tahunan/sasaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2021, sebagaimana pada renstra.

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Perubahan Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS terhadap Penduduk	2,38%	2,38%	100%

d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Perubahan Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase Penurunan PMKS terhadap Penduduk	2,38%	2,38%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja penurunan PMKS terhadap penduduk mencapai 100% dari target. Sehingga bisa dikatakan bahwa di tahun 2021 realisasi sama dengan target meskipun secara kuantitas terjadi kenaikan jumlah PMKS akibat masih adanya pandemi Covid-19.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	1.93%	1.89%	1.83%	2,23%	2,38%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, dengan kenaikan sebesar 0,15% dikarenakan dampak pandemi covid-19, akan tetapi di tahun sebelumnya capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi di Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	2,38%	2,38%	100%

Berdasarkan table tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja mencapai 123,2% dari target jangka menengah.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

Untuk perbandingan capaian kinerja dari standar nasional disampaikan bahwa pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan RENSTRA dan RPJMD adalah prosentase PMKS terhadap penduduk dalam arti mengukur prosentase penurunan PMKS, sedangkan standar nasional tercermin dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memfokuskan pada penanganan pemenuhan jenis pelayanan dasar. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan standar capaian kinerja nasional tidak dapat diperbandingkan.

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi di Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi di Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	2,38%	2,38%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

➔ Sasaran : Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dengan indikator sasaran yaitu Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dengan jumlah penurunan PMKS 2,38% dengan target 1,81% pada tahun 2021, maka Dinas Sosial harus terus berupaya mensinergikan program-program yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah untuk mendorong penurunan PMKS, dimana PMKS pada tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan akibat masih adanya pandemi Covid-19.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan :

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

➔ Sasaran : Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Masalah/kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dari jenis PMKS prioritas yang ditangani oleh Dinas Sosial ada 1 (satu) jenis PMKS yang sulit untuk dilakukan pembinaan yaitu gelandangan dan gelandangan psikotik.
2. Masih berlangsungnya pandemi covid-19 ditahun 2021 sehingga banyak warga yang terdampak sehingga PMKS mengalami kenaikan.
3. Ada beberapa desa yang tidak melaporkan hasil pendataan PMKS, sehingga sangat dimungkinkan adanya PMKS yang belum terdata yang berakibat pada kurangnya pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosialnya.

b. Solusi Dan Upaya Perbaikan di Tahun Mendatang

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial :

1. Melakukan pendataan kemiskinan dengan cara musyawarah desa dan musyawarah kelurahan secara berkala.
2. Melakukan pendataan PMKS secara berkala.
3. Memberikan Bantuan Sembako untuk warga miskin di Sidoarjo;
4. Melakukan pembinaan kepada korban NAPZA dan ODHA;
5. Memberikan pelatihan dasar bagi PMKS.
6. Pembentukan Kube baru disetiap kecamatan.

Rencana tindak lanjut Dinas Sosial tahun berikutnya :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan;
2. Lebih meningkatkan pembinaan, motivasi dan pendampingan terhadap PMKS dan keluarga serta kelompok masyarakat sekitar klien;
3. Memberi bimbingan motivasi untuk kelompok usaha bersama (KUBE);
4. Memberikan motivasi dan mengoptimalkan para pendamping sosial dalam melakukan pendampingan;
5. Memberikan pembinaan/pelatihan ketrampilan praktis untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga sesuai dengan minat bakatnya;

6. Mengupayakan/mengkoordinasikan dengan PSKS untuk melaksanakan implementasi program.
7. Membentuk Puskesmas di setiap desa agar data selalu update.
8. Meningkatkan SDM tim verifikasi dan validasi agar pendataan DTKS dan PMKS valid.
9. Penggunaan aplikasi SIKS-SDA untuk meminimalisir kesalahan data.
10. Pembentukan KUBE baru untuk membantu perekonomian PMKS.

3.4. Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian	Tingkat Keber- Hasilan	Penjelasan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85%	85%	100%	Berhasil	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	2 Tahap	2 Tahap	100%	Berhasil	
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomen dasi	1 Rekome ndasi	100%	Berhasil	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Berhasil	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Berhasil	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Berhasil	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Berhasil	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	85%	97,85%	122,31%	Berhasil	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	396 Orang	396 Orang	100%	Berhasil	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semestera n PD yang tersusun	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semestera n PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	98,32%	109,31%	Berhasil	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	27 Buah	27 Buah	100%	Berhasil	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	392 Buah	392 Buah	100%	Berhasil	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	22.380 Liter	21.493 Liter	96,04%	Berhasil	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	450 Buah	450 Buah	100%	Berhasil	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2 Buah	2 Buah	100%	Berhasil	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	329 Kotak	194 Kotak	58,97%	Cukup	
	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	329 Kotak	194 Kotak	58,97%	Cukup	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	29 Unit	29 Unit	100%	Berhasil	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang diadakan	29 Unit	29 Unit	100%	Berhasil	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	100%	Berhasil	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang di kelola	4500 Surat	5887 Surat	130,82%	Berhasil	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	48 Orang	48 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	48 Orang	48 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	228 Orang	228 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	336 Orang	330 Orang	98%	Berhasil	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	160 Unit	160 Unit	100%	Berhasil	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 STNK	19 STNK	100%	Berhasil	
	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	-	-	-	Berhasil	
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	19 STNK	19 STNK	100%	Berhasil	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung / kantor/rumah dinas / jabatan yang dipelihara / rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%	Berhasil	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Jenis	2 Jenis	100%	Berhasil	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	130 Unit	130 Unit	100%	Berhasil	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	Berhasil	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	6 PSKS	6 PSKS	100%	Berhasil	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	125 PSM	125 PSM	100%	Berhasil	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	216 TKSK	216 TKSK	100%	Berhasil	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang dibina	5 PSKS	5 PSKS	100%	Berhasil	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	1 LKS	1 LKS	100%	Berhasil	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Tuna Sosial yang terlayani	6,47%	6,47%	100%	Berhasil	

	Persentase penyandang Disabilitas yang terlayani	22%	22%	100%	Berhasil	
	Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	42,7%	42,7%	100%	Berhasil	
	Persentase PMKS yang terlayani	100%	100%	100%	Berhasil	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis yang Mendapat Permakanan	2319 Orang	2319 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar yang mendapat bantuan sandang	125 Orang	125 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, di luar panti yang mendapat alat bantu	16 Oorang	16 Oorang	100%	Berhasil	
	Jumlah gepeng terlantar yang mendapat bimbingan	900 Orang	900 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah keluarga anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar yang mendapat bimbingan	137 Orang	137 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	87 Orang	87 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	1332 Orang	1332 Orang	100%	Berhasil	
Penyediaan Permakanan	Jumlah gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	900 Orang	900 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan sandang	50 Orang	50 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan sandang	75 Orang	75 Orang	100%	Berhasil	
Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	16 Orang	16 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah gepeng terlantar yang mendapat bimbingan	900 Orang	900 Orang	100%	Berhasil	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah keluarga anak terlantar yang mendapat bimbingan	60 Orang	60 Orang	100%	Berhasil	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga						

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar yang mendapat bimbingan	87 Orang	87 Orang	100%	Berhasil	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	tersedianya layanan data dan pengaduan PMKS	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	
	Terlaksananya rakor penanganan PMKS	100 Orang	100 Orang	100%	Berhasil	
	Terlaksananya operasi simpati/penjangkauan PMKS	3 Bulan	3 Bulan	100%	Berhasil	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis terlantar	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya di luar panti yang mendapat permakanan	20 Orang	20 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100 Orang	100 Orang	100%	Berhasil	
Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS Lainnya di luar Panti yang mendapat bantuan permakanan	20 Orang	20 Orang	100%	Berhasil	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100 Orang	100 Orang	100%	Berhasil	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	41,21%	41,21%	100%	Berhasil	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang diusulkan pada DTKS	31,97%	31,97%	100%	Berhasil	
	Persentase Rekom JKMM yang dikeluarkan	100%	100%	100%	Berhasil	
	Persentase fakir miskin yang dilatih	-	-	-	-	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Terdata	624.103 Jiwa	624.103 Jiwa	100%	Berhasil	
	Jumlah Rumah KPM PKH yang Terlabeli	25000 Rumah	25000 Rumah	100%	Berhasil	
	Jumlah SDM yang Diberikan Penguatan	200 Orang	200 Orang	100%	Berhasil	

	Jumlah Desa yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data/Desk SIKS-NG	353 Desa	353 Desa	100%	Berhasil	
	Jumlah PUSKESOS yang Terfasilitasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100%	Berhasil	
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi SIKS-SDA	390 Orang	390 Orang	100%	Berhasil	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekom JKMM yang dikeluarkan	100%	100%	100%	Berhasil	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sosialisasi APBN yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%	Berhasil	
	Jumlah Rapat Koordinasi PKH yang Dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100%	Berhasil	
	Jumlah Rekonsiliasi Bansos PKH yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%	Berhasil	
	Jumlah Fakir Miskin Penerima Progran Sembako	6000 KPM	6000 KPM	100%	Berhasil	
	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Covid-19	100.000 KPM	97,259 KPM	97%	Berhasil	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	-	-	-	Berhasil	
	Jumlah keluarga miskin yang dimonev	-	-	-	Berhasil	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi KUBE	360 Orang	360 Orang	100%	Berhasil	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi KUBE	288 Orang	288 Orang	100%	Berhasil	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan Bencana sosial yang tertangani	100%	100%	100%	Berhasil	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina Tepat Waktu	50 Orang	50 Orang	100%	Berhasil	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah rakor/sosialisasi yang terlaksana	2 Kali	2 Kali	100%	Berhasil	
	Jumlah Anggota TAGANA yang Dibina	600 Orang	600 Orang	100%	Berhasil	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras dalam Kondisi yang Baik	100%	100%	100%	Berhasil	

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara	1 TMP	1 TMP	100%	Berhasil	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras yang dipelihara	1 TMP	1 TMP	100%	Berhasil	

3.5.Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.904.037.926,-	Rp. 7611667635	96,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 79.105.374,-	Rp. 78.636.600,-	99,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 76.221.164,-	Rp. 75.910.400,-	99,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 339.390,-	Rp. 339.200,-	99,94
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 339.390,-	Rp. 339.200,-	99,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 887.260,-	Rp. 850.200,-	95,82
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.318.170,-	Rp. 1197.600,-	90,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.472.805.365,-	Rp. 5.262.142.718,-	96,15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.470.586.000	Rp. 5.260.005.718	96,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 965.001	Rp. 883.800	91,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 1.254.364	Rp. 1.253.200	99,91

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 595.452.969,-	Rp. 570.815.806,-	95,86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.103.833,-	Rp. 2.103.300,-	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 27.438.355,-	Rp. 27.378.730,-	99,78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 223.800.000,-	Rp. 214.939.672,-	96,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.305.463,-	Rp. 2.250.000,-	97,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.720.000,-	Rp. 3.540.000,-	95,16
Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 7.632.500,-	Rp. 4.687.400,-	61,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 328.452.818,-	Rp. 315.916.704,-	96,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 418.923.834,-	Rp. 413.317.300	98,66
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 418.923.834,-	Rp. 413.317.300	98,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.115.110.800,-	Rp. 1.066.736.653,-	95,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 283.000.000,-	Rp. 251.348.798,-	88,82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 831.870.800,-	Rp. 815.147.855,-	97,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 222.639.584,-	Rp. 220.018.558	98,82%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 127.500.000,-	Rp. 125.718.500,-	98,60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 30.139.584,-	Rp. 29.965.058,-	99,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 3.000.000,-	Rp.2.930.000,-	97,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 62.000.000,-	Rp. 61.405.000,-	99,04
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2.541.137.685,-	Rp. 2.480.092.850,-	97,60
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.541.137.685,-	Rp. 2.480.092.850,-	97,60
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 192.853.600,-	Rp. 174.719.100,-	90,60
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 432.000.000,-	Rp. 424.000.000,-	98,15
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.910.710.806,-	Rp. 1.875.800.800,-	98,17
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp. 5.573.279,-	5.572.950,-	99,99
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 9.684.952.671	Rp. 9.639.793.635,-	99,53
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 9.624.915.551	Rp. 9.580.737.635,-	99,54
Penyediaan Permakanan	Rp. 8.337.485.718	Rp. 8.307.240.399	99,64
Penyediaan Sandang	Rp. 32.810.475	Rp. 32.527.500,-	99,14
Penyediaan Alat Bantu	Rp. 69.000.000,-	Rp. 67.915.000,-	98,43

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 342.809.296,-	Rp. 341.037.500,-	99,48
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 13.350.000,-	Rp. 13.123.800,-	98,31
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 68.613.516,-	Rp. 66.432.195,-	96,82
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 760.846.546,-	Rp. 752.461.241,-	98,90
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp. 60.037.120,-	Rp. 59.056.000,-	98,37
Penyediaan Permakanan	Rp. 14.937.120,-	Rp. 14.856.000,-	99,46
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 45.100.000,-	Rp. 44.200.000,-	98,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 13.983.692.800,-	Rp. 13.655.565.997,-	97,65
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.983.692.800,-	Rp. 13.655.565.997,-	97,65
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.503.067.892,-	Rp. 2.217.575.463,-	88,59
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.537.600,-	Rp. 44.416.595,-	99,73
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 11.072.355.308,-	Rp. 11.055.941.219,-	99,85
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 363.732.000,-	Rp. 337.632.720,-	92,82
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 329.082.678,-	Rp. 318.678.000	96,84
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 329.082.678,-	Rp. 318.678.000	96,84
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 329.082.678,-	Rp. 318.678.000	96,84

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 104.997.233,-	Rp. 98.123.050,-	93,46
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 104.997.233,-	Rp. 98.123.050,-	93,46
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.104.997.233,-	Rp. 98.123.050,-	93,46

Sumber data : LRA Dinas Sosial Tahun 2021

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	2,38	2,38	100	Rp. 34.547.900.993,-	Rp. 33.803.921.167,-	97,85

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1 Efektivitas dan Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	100	97,85	2,15

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran 1 : Menurunnya angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan capaian penyerapan anggaran 97,85%, sehingga efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 2,15%.

Efisien tersebut disebabkan oleh adanya efisien anggaran di beberapa kegiatan yang dalam realisasi anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketaatan dalam tatalaksana organisasi dan penatausahaan keuangan dengan berpedoman pada peraturan Bupati Sidoarjo nomor 101 Tahun 2018, Nomor 12, 40 dan 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun jika terdapat ketidaksesuain (hal baru yang belum diatur) maka akan dilakukan konsultasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan solusi.

BAB IV

PENUTUP / SIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 merupakan satu media pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sosial, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 dan dokumen penetapan kinerja tahun 2021.

LAKIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 3 fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder. Kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan dan sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, dimaksudkan untuk memperoleh saran dan masukan guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dari hasil analisis indikator kinerja yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan target yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari 1 (satu) indikator sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis, memiliki prosentase pencapaian kinerja sebesar 100% dengan kategori berhasil dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,85%.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan;
2. Lebih meningkatkan pembinaan, motivasi dan pendampingan terhadap PMKS dan keluarga serta kelompok masyarakat sekitar klien;
3. Memberi bimbingan motivasi untuk kelompok usaha bersama (KUBE);
4. Memberikan motivasi dan mengoptimalkan para pendamping sosial dalam melakukan pendampingan;
5. Memberikan pembinaan/pelatihan ketrampilan praktis untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga sesuai dengan minat bakatnya;
6. Mengupayakan/mengkoordinasikan dengan PSKS untuk melaksanakan implementasi program.

7. Membentuk Puskesmas disetiap desa agar data selalu update.
8. Meningkatkan SDM tim verifikasi dan validasi agar pendataan DTKS valid.
9. Penggunaan aplikasi SIKS-SDA untuk meminimalisir kesalahan data.
10. Pembentukan KUBE baru untuk membantu perekonomian PMKS.

Demikian Laporan Kinerja yang dapat disajikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kemajuan yang bisa disampaikan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan atau satu (1) tahun penuh sejak dari awal bulan Januari 2021 sampai dengan akhir bulan Desember 2021, sehingga dapat dipakai sebagai pijakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sidoarjo, Februari 2022

KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. ASROFI., MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003